

## PROVINSI JAMBI

#### **KEPUTUSAN BUPATI BUNGO**

NOMOR 100.3.3.2/ 6 /BPKAD TAHUN 2024

#### TENTANG

## PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

### BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang, Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonwsia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6841);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6.Undang-Undang......2

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupeten Bungo Nomor 6 Tahun 2022);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Badan Pegelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN ...... 3

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA BENDAHARA

UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bungo Tahun

Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut ;

a. menyiapkan Anggaran Kas;

b. menyiapkan SPD;c. menerbitkan SP2D;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah

ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelola/menatausahakan investasi;

 h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;

 melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

k. melakukan penagihan piutang daerah.

pengelolaan pendapatan belanja Non RKUD

KETIGA: Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum pada nomor urut 1, Nomor urut 2 dan Nomor urut 3 dalam lampiran

Keputusan Bupati ini melaksanakan tugas yang tercantum dalam

diktum KEDUA huruf a sampai huruf I;

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum pada

Nomor urut 4 dan nomor urut 5 dalam lampiran Keputusan Bupati ini melaksanakan tugas yang tercantum dalam diktum

KEDUA huruf j, huruf k dan Huruf l;

KELIMA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab

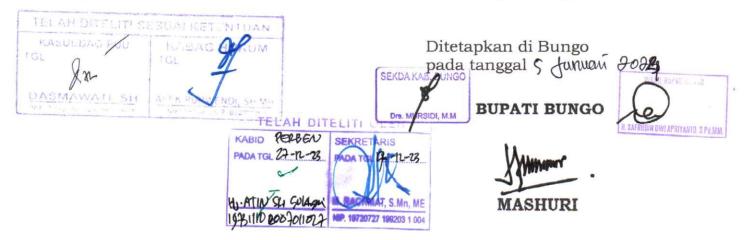
kepada Bendahara Umum Daerah;

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ / BPKAD TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2024

# PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	Hj. ATIEN SRI SULASMI, SE	Penata Tingkat I	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan
	NIP. 19731110 200701 2 027	Gol III/d	Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
2.	EKO YUDA PUTRA, SE.MM	Pembina	Kepala Sub Bidang
	NIP. 19791025 200501 1 008	Gol IV/a	Pelayanan Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
3.	HARIYANI, S.IP NIP. 19780520 19970 3 004	Penata Tingkat I Gol III/d	Kepala Sub Bidang Kas dan Penerimaan PPKD Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
4	PONCO SULISO, SE.MM NIP. 198006262008031001	Pembina Gol IV/a	Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan pada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
5	<u>SUSANTO, S.AB</u> NIP. 198403012005011001	Penata Gol III/c	Kepala Sub Bidang pelaporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah





**BUPATI BUNGO**,



MASHURI

TELAH DITELITI OLEH

KABID REPERU SEKRETARIS
PADA TGL 27-12-25

WILATURO SA SOLAGUM MECHMAT, S.Mn. ME
19731110 2007 Ollory NIP. 19720727 199203 1 004